

Program Berbasis Ekonomi Masyarakat



kalteng.co

KUALA KURUN, *kalteng.co* - Saat ini, seluruh perangkat daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) sedang menyusun rencana kerja (renja) tahun 2022 mendatang. Dalam renja itu, diharapkan bisa memasukkan program yang berbasis ekonomi untuk masyarakat.

"Kami ingin setiap perangkat daerah harus dapat meningkatkan program berbasis ekonomi masyarakat. Salah satu caranya dengan memasukkan ke dalam renja mereka," kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gumus Rayaniatie Djangkan, belum lama ini.

Pada tahun 2022 mendatang, menurut dia, seluruh perangkat daerah harus memperkuat dengan program berbasis ekonomi untuk masyarakat. Terlebih di masa pandemi Covid-19 yang terjadi sekarang ini. Tentu sangat berpengaruh pada menurunnya taraf perekonomian masyarakat.

"Program berbasis ekonomi untuk masyarakat sangat perlu untuk diperkuat, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan manfaatnya juga akan dapat dirasakan langsung oleh mereka. Hal itu yang memang sangat diperlukan masyarakat kita," tegasnya.

Legislatur dari daerah pemilihan (dapil) I yang mencakup Kecamatan Kurun, Mihing Raya, dan Sepang ini pun meminta kepada setiap perangkat daerah, agar harus lebih serius dalam melaksanakan program yang berbasis ekonomi untuk masyarakat di Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau ini.

"Kami juga meminta kepada Pemkab Gumus, agar selalu mendukung program itu dengan anggaran yang memadai bagi setiap perangkat daerah. Jadi tidak hanya berkutat di infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan saja. Tetapi juga harus perhatikan ekonomi masyarakat," tandas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Sumber berita:

1. Harian Kalteng Pos, Program Berbasis Ekonomi Masyarakat, Selasa, 28 September 2021.
2. <https://kalteng.co/>, Program Berbasis Ekonomi Masyarakat, Selasa, 28 September 2021.

Catatan:

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, menyatakan bahwa:

- (1) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 merupakan dokumen hasil sinkronisasi terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 yang dilaksanakan melalui:
 - a. rapat koordinasi pembangunan pusat bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya;
 - b. pertemuan para pihak;
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan provinsi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi;
 - d. musyawarah perencanaan pembangunan nasional; dan
 - e. pertemuan tiga pihak antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga.
- (2) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah 2020, Kerangka Ekonomi Makro, Strategi Pengembangan Wilayah, dan Strategi Pendanaan Pembangunan;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Arah Presiden, Tema Pembangunan, Sasaran Pembangunan, Arah Kebijakan, Strategi Pembangunan, dan Prioritas Nasional;
 - c. Sasaran, Indikator, dan Kerangka Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan proyek prioritas strategis (major project), kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan pendanaan pada Prioritas Nasional;
 - d. Kerangka Kelembagaan, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Evaluasi dan Pengendalian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.